

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-16/PJ/2016
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN
PASAL 26 SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN ORANG PRIBADI

PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

BAGIAN PERTAMA: PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
 - a. bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
 - b. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender

I.1. Penghitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja:

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

I.1.a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

I.1.a.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
 - 1) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau

- 2) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:
 - 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 - 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26
- b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2).
- c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
 - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf b.
5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

I.1.a.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun Berkala

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
 - b. penghasilan neto pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada butir I.1.a.1. angka 2 huruf a, c, dan d.

I.1.b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
 - a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan

memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur sebagaimana dimaksud pada butir I.1.a.1. angka 2 huruf b, c dan d.

1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:
 - a. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
 - b. PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.
 - c. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam Masa Pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk Masa Pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak.
 - b. Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan.

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS

II.1. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan:

1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
 - a. upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - b. upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - c. upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp450.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong
3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp450.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp450.000,00, dikalikan 5%.
4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000,00 dan kurang dari Rp 10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.
5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

II.2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan:

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) PPh

atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG BERSIFAT TIDAK TERATUR, DAN PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN

III.1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.2. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur

PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

IV. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI BUKAN PEGAWAI

IV.1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan

IV.1.a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

IV.1.b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

IV.2. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

IV.3. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka IV.1 dan angka IV.2 adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik

IV.4. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka IV.1 dan angka IV.2 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

IV.4.a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

IV.4.b. melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan penyerahan material atau barang.

V. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PESERTA KEGIATAN

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

VI. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

1. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.
2. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak luar negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

BAGIAN KEDUA: CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

I. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

I.1. Dengan Gaji Bulanan

- I.1.1.** Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp	5.750.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 5.750.000,00	Rp	287.500,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>200.000,00</u>	
			<u>RP 487.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	5.262.500,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 5.262.500,00		Rp	63.150.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	<u>4.500.000,00</u>	
			<u>Rp 58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	4.650.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 4.650.000,00	Rp	232.500,00	
PPh Pasal 21 bulan Januari			
Rp 232.500,00 : 12	Rp	19.375,00	

Catatan:

- a. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
- b. Contoh tersebut berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar $120\% \times Rp19.375,00 = Rp23.250,00$.
- c. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

- I.1.2.** Bambang Eko pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp8.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Eko membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp200.000,00, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Pada bulan Juli 2016 Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp	8.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp	40.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp	24.000,00
Penghasilan bruto		Rp	8.064.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 8.064.000,00	Rp	403.200,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	200.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	<u>160.000,00</u>	
			<u>Rp</u>
<u>663.200,00</u>			
Penghasilan neto sebulan		Rp	7.400.800,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 7.400.800,00		Rp	88.809.600,00

PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	<u>4.500.000,00</u>	
			Rp 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 30.309.600,00
PPH Pasal 21 Terutang			Rp 30.309.000,00
5% X Rp 30.309.000,00	Rp	1.515.450,00	
PPH Pasal 21 bulan Januari			
Rp 1.515.450,00 : 12		Rp	126.288,00

I.1.3. Tanti Agustin adalah seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp8.500.000,00. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) tempat Tanti Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2016 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji			Rp 8.500.000,00
Lembur (<i>overtime</i>)			Rp 2.000.000,00
Penghasilan bruto			Rp 10.500.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 10.500.000,00	Rp	525.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>50.000,00</u>	
			Rp 575.000,00
Penghasilan neto sebulan			Rp 9.925.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 9.925.000,00			Rp 119.100.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	<u>4.500.000,00</u>	
			Rp 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 60.600.000,00
PPH Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 50.000.000,00	Rp	2.500.000,00	
15% X Rp 10.600.000,00	Rp	<u>1.590.000,00</u>	
			Rp 4.090.000,00
PPH Pasal 21 bulan Januari			
Rp 4.090.000,00 : 12		Rp	340.833,00

Catatan :

Oleh karena suami Tanti Agustin tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Tanti Agustin adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.

I.1.4. Ikha Hapsari karyawan dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ikha Hapsari merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ikha Hapsari menerima gaji Rp5.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000,00 sebulan. Ikha Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Ikha Hapsari membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016 disamping menerima pembayaran gaji Ikha Hapsari juga menerima uang lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji			Rp 5.000.000,00
Lembur (<i>overtime</i>)			Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp 50.000,00
Premi Jaminan Kematian			Rp 15.000,00
Penghasilan bruto			Rp 7.065.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 7.065.000,00	Rp	353.250,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	<u>100.000,00</u>	
			Rp 503.250,00
Penghasilan neto sebulan			Rp 6.561.750,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 6.561.750,00			Rp 78.741.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
			Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 24.741.000,00

PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 24.741.000,00	Rp	1.237.050,00	
PPh Pasal 21 bulan Januari			
Rp 1.237.050,00 : 12	Rp		103.087,00

Catatan :

Karena suami Ikha Hapsari menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Ikha Hapsari adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

- I.1.5.** dr. Aulia Rais (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar Rp20.000.000,00. Jam praktik dr. Aulia Rais mulai pukul 8.00 s.d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2016 dr. Aulia Rais menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar Rp20.000.000,00 dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00. Dokter Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap bulannya.
Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Aulia Rais dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Agustus 2016 adalah:

Gaji			Rp	20.000.000,00
Penghasilan bruto			Rp	20.000.000,00
Pengurangan:				
1. Biaya Jabatan				
5% X Rp 20.000.000,00	Rp	1.000.000,00		
Maksium diperkenankan	Rp	500.000,00		
2. Iuran Pensiun	Rp	200.000,00		
			Rp	700.000,00
Penghasilan neto sebulan			Rp	19.300.000,00
Penghasilan neto setahun adalah				
12 X Rp 19.300.000,00			Rp	231.600.000,00
PTKP setahun				
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00		
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00		
- tambahan 3 orang tanggungan	Rp	13.500.000,00		
			Rp	72.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp	159.600.000,00
PPh Pasal 21 Terutang				
5% X Rp 50.000.000,00		Rp	2.500.000,00	
15% X Rp 109.600.000,00	Rp	16.440.000,00		
			Rp	18.940.000,00
PPh Pasal 21 bulan Januari				
Rp 18.940.000,00 : 12	Rp	1.578.333,00		

Catatan:

Penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa medis yang diterima oleh dr. Aulia Rais dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam contoh V.1.a.

I.2. Dengan Gaji Mingguan dan Gaji Harian
Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian

- I.2.1.** Oka Sagala, belum menikah, pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Mahagoni Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah :

Gaji (4 x Rp2.000.000,00)			Rp	8.000.000,00
Penghasilan bruto			Rp	8.000.000,00
Pengurangan:				
Biaya Jabatan				
5% X Rp 8.000.000,00	Rp	400.000,00		
			Rp	400.000,00
Penghasilan neto sebulan			Rp	7.600.000,00
Penghasilan neto setahun adalah				
12 X Rp 7.600.000,00			Rp	91.200.000,00
PTKP setahun				
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00		
			Rp	54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp	37.200.000,00
PPh Pasal 21 Terutang				
5% X Rp 37.200.000,00	Rp	1.860.000,00		
PPh Pasal 21 bulan Januari				
Rp 1.860.000,00 : 4	Rp	38.750,00		

- I.2.2.** Muhammad Shodiq, pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip, memperoleh gaji mingguan sebesar Rp

1.500.000,00. Muhammad Shodiq telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Muhammad Shodiq membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Dalam minggu kedua pada bulan Agustus 2016 Muhammad Shodiq hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja sehingga penghitungan PPh Pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus adalah:

Penghasilan sebulan			
4 X Rp 1.500.000,00			Rp 6.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp	60.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp	<u>18.000,00</u>
Penghasilan bruto		Rp	6.078.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 6.078.000,00		Rp	303.900,00
2. Iuran Pensiun		Rp	50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua		Rp	<u>120.000,00</u>
		Rp	<u>473.900,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	5.604.100,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 5.604.100,00		Rp	67.249.200,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri		Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah		Rp	4.500.000,00
- tambahan seorang anak		Rp	<u>4.500.000,00</u>
		Rp	<u>63.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	4.249.200,00
Pembulatan		Rp	4.249.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 4.249.000,00		Rp	212.450,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 212.450,00 : 12		Rp	17.704,00
PPh Pasal 21 minggu kedua			
Rp 17.704,00 : 4		Rp	4.426,00

I.2.3. Indradi pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp250.000,00. Indradi kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Indradi membayar iuran pensiun Rp35.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan			
26 X Rp 250.000,00			Rp 6.500.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp	65.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp	<u>19.500,00</u>
Penghasilan bruto		Rp	6.415.500,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 6.415.500,00		Rp	320.775,00
2. Iuran Pensiun		Rp	35.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua		Rp	<u>130.000,00</u>
		Rp	<u>487.775,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	5.929.725,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 5.929.725,00		Rp	71.156.700,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri		Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah		Rp	4.500.000,00
- tambahan seorang anak		Rp	<u>4.500.000,00</u>
		Rp	<u>63.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	8.156.700,00
Pembulatan		Rp	8.156.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 8.156.000,00		Rp	407.800,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 407.800,00 : 12		Rp	33.983,00
PPh Pasal 21 sehari			
Rp 33.983,00 : 26		Rp	1.307,00

I.3. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel

Retto sebagaimana tersebut dalam contoh nomor 1.1.1. di atas pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp6.750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Retto menerima rapel sejumlah Rp5.000.000,00 (selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari s.d. Mei 2016). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnyanya adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp	6.750.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 6.750.000,00	Rp	337.500,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	200.000,00	
			<u>Rp 537.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	6.212.500,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 6.212.500,00		Rp	74.550.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	<u>Rp</u>	<u>4.500.000,00</u>	
			<u>Rp 58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	16.050.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 16.050.000,00	Rp	802.500,00	
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 802.500,00 : 12	Rp	66.875,00	
PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2016 seharusnya adalah			
5 X Rp 66.875,00		Rp	334.375,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d. Mei 2016			
5 X Rp 19.375,00 (perhitungan contoh 1.1.1)		<u>Rp</u>	<u>96.875,00</u>
PPh Pasal 21 untuk uang rapel		Rp	237.500,00

I.4. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa: Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun

I.4.1. Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp8.000.000,00, sehingga pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp5.000.000,00 dan bonus sebesar Rp8.000.000,00. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

I.4.1. a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Penghasilan setahun			
12 X Rp 5.000.000,00		Rp	60.000.000,00
Bonus		<u>Rp</u>	<u>8.000.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun		Rp	68.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 68.000.000,00	Rp	3.400.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun			
12 X Rp 80.000,00	<u>Rp</u>	<u>960.000,00</u>	
			<u>Rp 4.360.000,00</u>
Penghasilan neto setahun adalah		Rp	63.640.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp</u>	<u>54.000.000,00</u>	
			<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	9.640.000,00
PPh Pasal 21 terutang			
5% X Rp 9.640.000,00		Rp	482.000,00

I.4.1. b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Penghasilan setahun			
12 X Rp 5.000.000,00		<u>Rp</u>	<u>60.000.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun		Rp	60.000.000,00

Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 60.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun 12 X Rp 80.000,00	<u>Rp 960.000,00</u>	
		<u>Rp 3.960.000,00</u>
Penghasilan neto setahun adalah PTKP setahun	Rp 56.040.000,00	
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp 2.040.000,00	Rp 102.000,00	Rp 2.040.000,00

I.4.1. c. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah Rp 482.000,00 - Rp 102.000,00	Rp 380.000,00
---	---------------

- 1.4.2.** Karyawati Shanaya Aqeela (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar 5.000.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Shanaya Aqeela membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2016 Shanaya Aqeela memperoleh bonus sebesar Rp6.000.000,00 sehingga pada bulan April 2016 Shanaya Aqeela menerima pembayaran berupa gaji sebesar sebesar Rp5.000.000,00 dan bonus sebesar Rp6.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut:

I.4.2. a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Penghasilan setahun		
Gaji (12 X Rp5.000.000,00)		Rp 60.000.000,00
Bonus		Rp 6.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 X Rp50.000,00)		Rp 600.000,00
Premi Jaminan Kematian (12 X Rp15.000,00)		<u>Rp 180.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun		Rp 66.780.000,00
Penghasilan bruto setahun		
		Rp 66.780.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 66.780.000,00	Rp 3.339.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun 12 X Rp 50.000,00	Rp 600.000,00	
3. Jaminan Hari Tua 12 X Rp 100.000,00	<u>Rp 1.200.000,00</u>	
		<u>Rp 5.139.000,00</u>
Penghasilan neto setahun adalah PTKP setahun	Rp	61.641.000,00
- untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp 7.641.000,00	Rp 7.641.000,00 Rp 382.050,00	

I.4.2. b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Penghasilan setahun		
Gaji (12 X Rp5.000.000,00)		Rp 60.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 X Rp50.000,00)		Rp 600.000,00
Premi Jaminan Kematian (12 X Rp15.000,00)		<u>Rp 180.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun		Rp 60.780.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 60.780.000,00	Rp 3.039.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun 12 X Rp 50.000,00	Rp 600.000,00	
3. Jaminan Hari Tua 12 X Rp 100.000,00	<u>Rp 1.200.000,00</u>	
		<u>Rp 4.839.000,00</u>
Penghasilan neto setahun adalah PTKP setahun	Rp	55.941.000,00
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	

Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	<u>54.000.000,00</u>
PPH Pasal 21 terutang			1.941.000,00
5% X Rp 1.941.000,00	Rp	97.050,00	

1.4.2. c. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPH Pasal 21 atas Bonus adalah			
Rp 382.050,00 - Rp 97.050,00	Rp	285.000,00	

I.5. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Dipindahtugaskan Dalam Tahun Berjalan

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh penghitungan:

Didin Qomarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut.

Gaji Didin Qomarudin sebesar Rp5.000.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Didin Qomarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21:

I.5.1. Kantor Pusat di Jakarta

Gaji selama di Kantor Jakarta			
5 X Rp 5.000.000,00		Rp	25.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 25.000.000,00	Rp	1.250.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun			
5 X Rp 100.000,00	Rp	<u>500.000,00</u>	
			Rp <u>1.750.000,00</u>
Penghasilan neto lima bulan adalah			Rp 23.250.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12/5 X Rp 23.250.000,00		Rp	55.800.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>	
			Rp <u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	1.800.000,00	
PPH Pasal 21 terutang			
5% X Rp 1.800.000,00	Rp	90.000,00	
PPH Pasal 21 terutang Januari s.d Mei 2016			
5/12 X Rp 90.000,00		Rp	37.500,00
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 2016			
5 X Rp 7.500,00		Rp	37.500,00

Catatan:

PPH Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp7.500,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2016)			
5 X Rp 5.000.000,00		Rp	25.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 25.000.000,00	Rp	1.250.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun			
5 X Rp 100.000,00	Rp	<u>500.000,00</u>	
			Rp <u>1.750.000,00</u>
Penghasilan neto lima bulan adalah			Rp 23.250.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 /5 X Rp 23.250.000,00		Rp	55.800.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>	
			Rp <u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	1.800.000,00	
PPH Pasal 21 disetahunkan			
5% X Rp 1.800.000,00	Rp	90.000,00	
PPH Pasal 21 terutang			
5/12 X Rp 90.000,00		Rp	37.500,00
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi (Januari s.d. Mei 2016)			
5 X Rp 7.500,00		Rp	<u>37.500,00</u>
PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong			NIHIL

I.5.2. Kantor Cabang Bandung
a. Penghasilan neto di Bandung

Gaji (Juni s.d. September 2016) 4 X Rp 5.000.000,00		Rp 20.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 20.000.000,00	Rp 1.000.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun 4 X Rp 100.000,00	<u>Rp 400.000,00</u>	
		<u>Rp 1.400.000,00</u>
Penghasilan neto empat bulan adalah		Rp 18.600.000,00

b. Penghasilan neto di Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2016)		Rp 23.250.000,00
Jumlah penghasilan neto 9 bulan	Rp	41.850.000,00

Penghasilan neto disetahunkan 12/9 X Rp 41.850.000,00		Rp 55.800.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	1.800.000,00

PPH Pasal 21 terutang disetahunkan 5% X Rp 1.800.000,00	Rp 90.000,00	
PPH Pasal 21 selama 9 bulan 9/12 X Rp 90.000,00	Rp 67.500,00	

PPH Pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta	Rp 37.500,00	
PPH Pasal 21 terutang di Bandung	Rp 30.000,00	
PPH Pasal 21 yang di potong di Bandung 4 X Rp 7.500,00	<u>Rp 30.000,00</u>	
PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

Catatan: PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai dengan September untuk setiap bulannya adalah Rp 7.500,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) di Kantor Bandung
Penghasilan neto di Bandung

Gaji (Juni s.d. September 2016) 4 X Rp 5.000.000,00		Rp 20.000.000,00
--	--	------------------

Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 20.000.000,00	Rp 1.000.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun 4 X Rp 100.000,00	<u>Rp 400.000,00</u>	
		<u>Rp 1.400.000,00</u>

Penghasilan neto 4 bulan adalah		Rp 18.600.000,00
Penghasilan neto di Jakarta adalah		Rp 23.250.000,00
Jumlah penghasilan neto 9 bulan adalah		Rp 41.850.000,00

Penghasilan neto disetahunkan 12/9 X Rp 41.850.000,00		Rp 55.800.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	1.800.000,00

PPH Pasal 21 disetahunkan 5% X Rp 1.800.000,00	Rp 90.000,00	
PPH Pasal 21 selama 9 bulan 9/12 X Rp 90.000,00	Rp 67.500,00	
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi di Jakarta (sesuai Form. 1721-A1)	Rp 37.500,00	
di Bandung (4 x Rp7.500,00)	Rp 30.000,00	
PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

I.5.3. Kantor Cabang Garut
Penghasilan neto di Garut

Gaji (Oktober s.d. Desember 2016) 3 X Rp 5.000.000,00		Rp 15.000.000,00
--	--	------------------

Pengurangan		
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 5.000.000,00	Rp 750.000,00	
2. Iuran pensiun		

3 X Rp 100.000,00	Rp	<u>300.000,00</u>	Rp	<u>1.050.000,00</u>
Penghasilan neto di Garut (3 bulan)			Rp	13.950.000,00
Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)			Rp	23.250.000,00
Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)			Rp	<u>18.600.000,00</u>
			Rp	55.800.000,00
PTKP setahun				
- untuk Wajib Pajak sendiri			Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp			1.800.000,00
PPH Pasal 21 Terutang Setahun				
5% X Rp 1.800.000,00			Rp	90.000,00
PPH Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721 - A1			Rp	<u>67.500,00</u>
PPH Pasal 21 terutang di Garut			Rp	22.500,00
PPH Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut				
Rp 22.500,00 : 3			Rp	7.500,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) di Kantor Garut Penghasilan neto di Garut

Gaji (Oktober s.d. Desember 2016)				
3 X Rp 5.000.000,00			Rp	<u>15.000.000,00</u>
Pengurangan:				
1. Biaya Jabatan				
5% X Rp 15.000.000,00	Rp	750.000,00		
2. Iuran Pensiun setahun				
3 X Rp 100.000,00	Rp	<u>300.000,00</u>		
			Rp	<u>1.050.000,00</u>
Penghasilan neto di Garut (3 bulan)			Rp	13.950.000,00
Penghasilan neto masa sebelumnya				
Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)			Rp	23.250.000,00
Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)			Rp	<u>18.600.000,00</u>
Jumlah Penghasilan neto setahun			Rp	55.800.000,00
PTKP setahun				
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>		
			Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp		1.800.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun				
5% X Rp 1.800.000,00			Rp	90.000,00
PPH Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721 - A1			Rp	67.500,00
PPH Pasal 21 terutang di Garut			Rp	22.500,00
PPH Pasal 21 telah dipotong (3 x Rp7.500,00)			Rp	22.500,00
PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong				NIHIL

I.6. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Berhenti Bekerja atau Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan

I.6.1. Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.1.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun

Suwondo bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Suwondo menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 15.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2016 dalam hal Suwondo hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut:				
Gaji sebulan			Rp	15.500.000,00
Pengurangan:				
1. Biaya Jabatan				
5% X Rp15.500.000,00=Rp775.000,00				
Biaya Jabatan maksimal per bulan	Rp	500.000,00		
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>150.000,00</u>		
			Rp	<u>650.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan			Rp	14.850.000,00
Penghasilan neto setahun adalah				
4 X Rp 14.850.000,00			Rp	59.400.000,00
PTKP setahun				
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00		
- tambahan karena menikah	Rp	<u>4.500.000,00</u>		
			Rp	<u>58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp		900.000,00
PPH Pasal 21 Terutang				

5% X Rp 900.000,00	Rp	45.000,00
PPH Pasal 21 bulan September		
Rp 45.000,00 : 4	Rp	11.250,00

I.6.1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan

David Raisita (K/3) mulai bekerja 1 September 2016. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2018. Selama Tahun 2016 menerima gaji per bulan Rp20.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September tahun 2016 dalam hal David Raisita hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp	20.000.000,00
Pengurangan:			
Biaya Jabatan			
5% X Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00			
Biaya Jabatan maksimal per bulan	Rp	<u>500.000,00</u>	
			Rp <u>500.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan			Rp 19.500.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			
4 X Rp 19.500.000,00	Rp	78.000.000,00	
Penghasilan neto disetahunkan			
12/4 X Rp 78.000.000,00			Rp 234.000.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00	
- tambahan 3 orang anak (3 x Rp4.500.000,00)	Rp	<u>13.500.000,00</u>	
			Rp <u>72.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	162.000.000,00
PPH Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 50.000.000,00	Rp	2.500.000,00	
15% X Rp 112.000.000,00	Rp	<u>16.800.000,00</u>	
			Rp 19.300.000,00
PPH Pasal 21 terutang untuk tahun 2016			
4/12 X Rp 19.300.000,00	Rp	6.433.333,00	
PPH Pasal 21 terutang sebulan			
1/4 X Rp 6.433.333,00	Rp	1.608.333,00	

I.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.2.1. Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Sulistiyo Wibowo yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Sulistiyo Wibowo setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp 100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Sulistiyo Wibowo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Gaji sebulan		Rp	6.500.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 6.500.000,00	Rp	325.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>100.000,00</u>	
			Rp <u>425.000,00</u>
Penghasilan neto			Rp 6.075.000,00
Jumlah penghasilan neto setahun			
12 X Rp 6.075.000,00			Rp 72.900.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>	
			Rp <u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	18.900.000,00
PPH Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 18.900.000,00	Rp	945.000,00	
PPH Pasal 21 bulan September			
Rp 945.000,00 : 12	Rp	78.750,00	

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2016 (s.d. bulan September 2016) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Januari s.d. September 2016)			
9 X Rp 6.500.000,00			Rp 58.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% X Rp 58.500.000,00	Rp 2.925.000,00	
2. Iuran Pensiun 9 X Rp 100.000,00	<u>Rp 900.000,00</u>	<u>Rp 3.825.000,00</u>
Penghasilan neto 9 bulan		Rp 54.675.000,00
Penghasilan neto 9 bulan PTKP setahun		Rp 54.675.000,00
- untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>	<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	<u>675.000,00</u>
PPH Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 675.000,00	Rp 33.750,00	
PPH Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d. September 2016		Rp 33.750,00
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2016 8 X Rp 78.750,00		<u>Rp 630.000,00</u>
PPH Pasal 21 yang lebih dipotong		<u>Rp 596.250,00</u>

Catatan :

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp596.250,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

I.6.2.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Lewis Oshea (K/3) mulai bekerja Mei 2014 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2016 menerima gaji perbulan sebesar Rp15.000.000,00 dan pada bulan April 2016 menerima bonus sebesar Rp20.0000.000,00.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah:

Gaji sebulan		Rp 15.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% X Rp15.000.000,00=Rp750.000,00		
Biaya Jabatan maksimal per bulan	<u>Rp 500.000,00</u>	<u>Rp 500.000,00</u>
Penghasilan neto atas gaji sebulan		Rp 14.500.000,00
Penghasilan neto setahun adalah 12 X Rp 14.500.000,00		Rp 174.000.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00	
- tambahan 3 orang anak (3 x Rp4.500.000,00)	<u>Rp 13.500.000,00</u>	<u>Rp 72.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	<u>102.000.000,00</u>
PPH Pasal 21 Terutang		
5% X Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
15% X Rp 52.000.000,00	<u>Rp 7.800.000,00</u>	
	Rp 10.300.000,00	
PPH Pasal 21 atas gaji sebulan Rp 10.300.000,00 : 12	Rp 858.333,00	

b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus:

Gaji Setahun 12 X Rp 15.000.000,00		Rp 180.000.000,00
Bonus		<u>Rp 20.000.000,00</u>
Penghasilan bruto		Rp 200.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% X Rp200.000.000,00=Rp10,000.000,00		
Biaya Jabatan maksimal per tahun	<u>Rp 6.000.000,00</u>	<u>Rp 6.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	<u>194.000.000,00</u>
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00	
- tambahan 3 orang anak (3 x Rp4.500.000,00)	<u>Rp 13.500.000,00</u>	<u>Rp 72.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	<u>122.000.000,00</u>

PPh Pasal 21 Terutang		
5% X Rp 50.000.000,00	Rp	2.500.000,00
15% X Rp 72.000.000,00	Rp	<u>10.800.000,00</u>
	Rp	13.300.000,00

c. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus

Rp 13.300.000,00 - Rp 10.300.000,00 = Rp 3.000.000,00

d. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya:

Gaji selama 5 bulan		
5 X Rp 15.000.000,00	Rp	75.000.000,00
Bonus	Rp	<u>20.000.000,00</u>
	Rp	95.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% X Rp95.000.000,00=Rp4.750.000,00		
Biaya Jabatan maksimal per bulan	Rp	500.000,00
Rp 5 X Rp 500.000,00		<u>Rp 2.500.000,00</u>
Penghasilan neto selama 5 bulan	Rp	92.500.000,00
Jumlah penghasilan neto disetahunkan		
12/5 X Rp 92.500.000,00	Rp	222.000.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan 3 orang anak	Rp	<u>13.500.000,00</u>
(3 x Rp4.500.000,00)		<u>Rp 72.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	150.000.000,00
PPh Pasal 21 Terutang		
5% X Rp 50.000.000,00	Rp	2.500.000,00
15% X Rp 100.000.000,00	Rp	<u>15.000.000,00</u>
	Rp	17.500.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5/12 X Rp 17.500.000,00	Rp	7.291.666,00
PPh Pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April 2016 atas gaji dan bonus		
(4 X Rp 858.333,00) + Rp 3.000.000,00	Rp	<u>6.433.332,00</u>
PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk bulan Mei	Rp	858.333,00

Catatan :

Cara penghitungan tersebut berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia.

I. 7. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya Diperoleh Dalam Mata Uang Asing

Neill Mc Leary adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2016 dalam mata uang asing sebesar US\$2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 13.766,00 per US\$1.00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak.

Gaji sebulan		
US\$2,000 X Rp 13.766,00	Rp	27.532.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% X Rp27.532.000,00=Rp 1.376.600,00		
Biaya Jabatan maksimal per bulan	Rp	<u>500.000,00</u>
		<u>Rp 500.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp	27.032.000,00
Penghasilan neto setahun		
12 X Rp 27.032.000,00	Rp	324.384.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan 1 orang anak	Rp	<u>4.500.000,00</u>
		<u>Rp 63.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	261.384.000,00
PPh Pasal 21 Terutang		
5% X Rp 50.000.000,00	Rp	2.500.000,00
15% X Rp 200.000.000,00	Rp	30.000.000,00
25% X Rp 11.384.000,00	Rp	<u>2.846.000,00</u>
	Rp	35.346.000,00

PPh Pasal 21 bulan Januari

Rp 35.346.000,00 :12

Rp

2.945.500,00

I.8. PPh Pasal 21 Seluruh atau Sebagian Ditanggung oleh Pemberi Kerja

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Adi Putro adalah seorang pegawai dari PT Lautan Otomata dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp6.500.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juli 2016 dalam hal Adi Putro hanya menerima pembayaran gaji saja adalah:

Gaji sebulan		Rp	<u>6.500.000,00</u>
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 6.500.000,00	Rp	325.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>150.000,00</u>	
			Rp <u>425.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	6.025.000,00
Penghasilan neto setahun			
12 X Rp 6.025.000,00		Rp	72.300.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00	
- tambahan 3 orang anak (3 x Rp4.500.000,00)	Rp	<u>13.500.000,00</u>	
			Rp <u>72.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp		300.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 300.000,00	Rp	15.000,00	
PPh Pasal 21 bulan Juli			
Rp 15.000,00 :12	Rp	1.250,00	

PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.250,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp 1.250,00 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Adi Putro.

Namun apabila pemberi kerja adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profil), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, dan penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh Nomor I.10.

I.9. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan:

Edward Simatupang (status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan) bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionirindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.500.000,00 sebulan. Kepada Edward Simatupang diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 150.000,00. Iuran pensiun yang dibayar oleh Edward Simatupang adalah sebesar Rp 100.000,00 sebulan.

PPh Pasal 21 bulan September 2016 dalam hal Edward Simatupang tidak menerima penghasilan dari PT Kartika Kawashima Pionirindo selain gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan		Rp	5.500.000,00
Tunjangan pajak		Rp	<u>150.000,00</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp		5.650.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 5.650.000,00	Rp	282.500,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>100.000,00</u>	
			Rp <u>382.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	5.267.500,00
Penghasilan neto setahun			
12 X Rp 5.267.500,00		Rp	63.210.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>	
			Rp <u>54.000.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	9.210.000,00
PPH Pasal 21 setahun			
5% X Rp 9.210.000,00	Rp	460.500,00	
PPH Pasal 21 bulan Juli			
Rp 460.500,00 :12	Rp	38.375,00	

I.10. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

Maydina Aprilianto adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), pada bulan Agustus 2016 memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Maydina Aprilianto berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu:

Gaji sebulan			Rp	5.000.000,00
Beras	50 X Rp	15.000,00	Rp	750.000,00
Gula	10 X Rp	12.000,00	Rp	<u>120.000,00</u>
Penghasilan bruto sebulan			Rp	5.870.000,00
Pengurangan:				
Biaya Jabatan				
5% X Rp 5.870.000,00		Rp	<u>293.500,00</u>	
			Rp	<u>293.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan			Rp	5.576.500,00
Penghasilan neto setahun				
12 X Rp 5.576.500,00			Rp	66.918.000,00
PTKP setahun				
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00		
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00		
- tambahan 1 orang anak	Rp	<u>4.500.000,00</u>		
			Rp	<u>63.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp	3.918.000,00
PPH Pasal 21 setahun				
5% X Rp 3.918.000,00	Rp	195.900,00		
PPH Pasal 21 bulan Agustus				
Rp 195.900,00 :12	Rp	16.325,00		

I.11. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan

Adi Putra Tarigan, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Sumber Melati Diski dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp6.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Adi Putra Tarigan baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Sumber Melati Diski untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni.

Gaji dan tunjangan sebulan			Rp	6.500.000,00
Pengurangan:				
1. Biaya Jabatan				
5% X Rp 6.500.000,00	Rp	325.000,00		
2. Iuran pensiun	Rp	<u>200.000,00</u>		
			Rp	<u>525.000,00</u>
Penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan			Rp	5.975.000,00
Penghasilan neto setahun				
12 X Rp 5.975.000,00			Rp	71.700.000,00
PTKP setahun				
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00		
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp	17.700.000,00
PPH Pasal 21 atas penghasilan setahun				
5% X Rp 17.700.000,00	Rp	885.000,00		
PPH Pasal 21 atas gaji sebulan				
Rp 885.000,00 : 12	Rp	73.750,00		
PPH Pasal 21 yang harus dipotong karena yang bersangkutan belum memiliki NPWP				
120% X Rp 73.750,00	Rp	88.500,00		
Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari Januari-Mei 2016				
5 X Rp 88.500,00			Rp	442.500,00
Jumlah PPh Pasal 21 terutang apabila yang bersangkutan memiliki NPWP				

5 X Rp 73.750,00	Rp	<u>368.750,00</u>
Selisih (20%/120% X 5 X Rp88.500,00)	Rp	73.750,00

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong untuk bulan Juni 2016, setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja, dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 2016 tidak berubah, adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya)	Rp	73.750,00
--	----	-----------

Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-Mei 2016) 20%/120% x 5 x Rp88.500,00	Rp	<u>73.750,00</u>
---	----	------------------

PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 2016 NIHIL

Apabila Adi Putra Tarigan baru memiliki NPWP pada akhir November 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember 2016, dengan asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya)	Rp	73.750,00
--	----	-----------

Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-November 2016) 11 x (Rp88.500,00 - Rp73.750,00)	Rp	<u>162.250,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Desember 2016	(Rp)	88.500,00

Karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Desember 2016, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah Nihil. Jumlah sebesar Rp88.500,00 dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan berikutnya, jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016, di mana Adi Putra Tarigan baru memiliki NPWP pada akhir bulan November 2016 sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan setahun 12 X Rp 6.500.000,00	Rp	78.000.000,00
--	----	---------------

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% X Rp 78.000.000,00	Rp	3.900.000,00
2. Iuran pensiun 12 X Rp 200.000,00	Rp	<u>2.400.000,00</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	<u>6.300.000,00</u>

PTKP setahun - untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	<u>17.700.000,00</u>

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun 5% X Rp 17.700.000,00	Rp	885.000,00
--	----	------------

PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari-November 2016 Rp 88.500,00 X 11	Rp	<u>973.750,00</u>
Bulan Desember 2016	(Rp)	88.500,00

PPh Pasal 21 lebih dipotong untuk diperhitungkan pada bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya	Rp	88.500,00
---	----	-----------

Karena jumlah sebesar Rp88.500,00 sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang bulan berikutnya oleh Pemotong PPh Pasal 21, maka jumlah yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang bersangkutan sebesar Rp885.000,00.

I.12. Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada Masa Pajak terakhir, yaitu:

- Bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang Bekerja sampai dengan akhir tahun kalender;
- Bulan Terakhir Memperoleh Gaji atau Penghasilan Tetap dan Teratur karena yang Bersangkutan Berhenti Bekerja.

I.12.1. Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong pada Bulan Desember

- Dalam Hal Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Sama/Tidak Berubah, maka jumlah PPh Pasal

- 21 yang harus dipotong pada bulan Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada bulan-bulan sebelumnya.
- b. Dalam Hal Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Mengalami Perubahan.

Sisusa, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Adi Pratama Putra dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Mulai bulan Juli 2016, Sisusa memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp7.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan		Rp	5.500.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 5.500.000,00	Rp	275.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>200.000,00</u>	
		Rp	<u>475.000,00</u>
Penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan		Rp	5.025.000,00
Penghasilan neto setahun			
12 X Rp 5.025.000,00		Rp	60.300.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>	
		Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	6.300.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun			
5% X Rp 6.300.000,00	Rp	315.000,00	
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan			
Rp 315.000,00 :12	Rp	26.250,00	

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli-November 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan		Rp	7.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 7.000.000,00	Rp	350.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>200.000,00</u>	
		Rp	<u>550.000,00</u>
Penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan		Rp	6.450.000,00
Penghasilan neto setahun			
12 X Rp 6.450.000,00		Rp	77.400.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>	
		Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	23.400.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun			
5% X Rp 23.400.000,00	Rp	1.170.000,00	
PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan			
Rp 1.170.000,00 :12	Rp	97.500,00	

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016:

Penghasilan selama setahun			
6 X Rp 5.500.000,00	Rp	33.000.000,00	
6 X Rp 7.000.000,00	Rp	<u>42.000.000,00</u>	
		Rp	75.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 75.000.000,00	Rp	3.750.000,00	
2. Iuran Pensiun			
12 X Rp 200.000,00	Rp	<u>2.400.000,00</u>	
		Rp	<u>6.150.000,00</u>
Penghasilan neto		Rp	68.850.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>	
		Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	14.850.000,00
PPh Pasal 21 yang terutang			
5% X Rp 14.850.000,00	Rp	742.500,00	
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2016			

6 X Rp 26.250,00	Rp	157.500,00	
5 X Rp 97.500,00	Rp	<u>487.500,00</u>	
			Rp 645.000,00
PPH Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016			Rp 97.500,00

I.12.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong pada Bulan Terakhir Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Tetap dan Teratur Karena Yang Bersangkutan Berhenti Bekerja sebelum Bulan Desember

Contoh: Lihat Contoh I.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan.

II. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

II.1 Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan

II.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode di mana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.

Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan netto setahun seperti pada **Contoh I.6.2.1**. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

Contoh :

Hari Irawan, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Nusa Indah Gemilang dengan gaji sebulan sebesar Rp 13.000.000,00. Hari Irawan setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000,00 ke Dana Pensiun Artha Mandiri yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Nusa Indah Gemilang terhitung mulai 1 Juli 2016, Hari Irawan akan memasuki masa pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan			
Gaji sebulan			Rp 13.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp13.000.000,00=Rp650.000,00			
Maksium diperkenankan	Rp	500.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>250.000,00</u>	
			Rp 750.000,00
Penghasilan netto			Rp 12.250.000,00
Jumlah penghasilan netto 6 bulan (masa bekerja Januari-Juni 2016)			
6 X Rp 12.250.000,00			Rp 73.500.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00	
- tambahan 2 orang anak	Rp	<u>9.000.000,00</u>	
(2 X Rp4.500.000,00)			Rp 67.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp		6.000.000,00
PPH Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 6.000.000,00	Rp	300.000,00	
PPH Pasal 21 sebulan			
Rp 300.000,00 : 6	Rp	50.000,00	

Pada saat Hari Irawan berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut:

Gaji 6 bulan			
6 X Rp 13.000.000,00			Rp 78.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 78.000.000,00	Rp	3.900.000,00	
Maksium diperkenankan	Rp	3.000.000,00	
2. Iuran Pensiun			
6 X Rp 250.000,00	Rp	1.500.000,00	
			Rp 4.500.000,00
Penghasilan netto 6 bulan			Rp 73.500.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	

- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00	
- tambahan 2 orang anak (2 X Rp4.500.000,00)	<u>Rp 9.000.000,00</u>	<u>Rp 67.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	6.000.000,00
PPH Pasal 21 Terutang 5% X Rp 6.000.000,00	Rp 300.000,00	
PPH Pasal 21 yang telah dipotong Rp 50.000,00 X 6	<u>Rp 300.000,00</u>	
PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong	NIHIL	

Apabila pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja), akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan, yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

II.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan

Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggung penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A- 1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.

Melanjutkan contoh sebelumnya:

Selanjutnya, mulai bulan Juli 2016 Hari Irawan memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Artha Mandiri sebesar Rp6.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut:

Pensiun sebulan	Rp 6.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya pensiun	
5% X Rp6.000.000,00=Rp300.000,00	
Maksimum diperkenankan	<u>Rp 200.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 5.800.000,00
Penghasilan neto Juli-Desember 2016 6 X Rp 5.800.000,00	Rp 34.800.000,00
Penghasilan neto dari PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	<u>Rp 73.500.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto tahun 2016	Rp 108.300.000,00

PTKP setahun	
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00
- tambahan 2 orang anak (2 X Rp4.500.000,00)	<u>Rp 9.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 40.800.000,00

PPH Pasal 21 Terutang 5% X Rp 40.800.000,00	Rp 2.040.000,00
--	-----------------

PPH Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)	<u>Rp 300.000,00</u>
---	----------------------

PPH Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Artha Mandiri, selama 6 bulan adalah	Rp 1.740.000,00
---	-----------------

PPH Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bulan adalah Rp 1.740.000,00 : 6	Rp 290.000,00
--	---------------

Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Artha Mandiri untuk dicantumkan dalam Form 1721 A1:

Pensiun 6 bulan 6 X Rp 6.000.000,00	Rp 36.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Pensiun	
5% X Rp36.000.000,00=Rp1.800.000,00	
Maksimum diperkenankan	<u>Rp 1.200.000,00</u>
Penghasilan neto 6 bulan	Rp 34.800.000,00
Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh	

Pasal 21 adalah		Rp 73.500.000,00
Jumlah penghasilan neto tahun 2016		Rp 108.300.000,00

PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00	
- tambahan 2 orang anak (2 X Rp4.500.000,00)	<u>Rp 9.000.000,00</u>	
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	<u>Rp 67.500.000,00</u>
		40.800.000,00

PPh Pasal 21 Terutang 5% X Rp 40.800.000,00		Rp 2.040.000,00
--	--	-----------------

PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)		<u>Rp 300.000,00</u>
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Swadhana Utama, selama 6 bulan adalah		Rp 1.740.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong Rp 290.000,00 X 6		<u>Rp 1.740.000,00</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

II.2 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya

Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 2017 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut:

Pensiun sebulan		Rp 6.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Pensiun		
5% X Rp 6.000.000,00	<u>Rp 300.000,00</u>	
Maksimum diperkenankan		<u>Rp 200.000,00</u>
Penghasilan neto 6 bulan		Rp 5.800.000,00
Penghasilan disetahunkan 12 X Rp 5.800.000,00		Rp 69.600.000,00

PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00	
- tambahan 2 orang anak (2 X Rp4.500.000,00)	<u>Rp 9.000.000,00</u>	
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	<u>Rp 67.500.000,00</u>
		2.100.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% X Rp 2.100.000,00		Rp 105.000,00
--	--	---------------

PPh Pasal 21 sebulan Rp 105.000,00 : 12		Rp 8.750,00
--	--	-------------

III. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

III.1. Dengan Upah Harian

III.1.1 Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000,00.

Upah sehari		Rp 450.000,00
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh		<u>Rp 450.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Sehari		Rp 0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d. hari ke-11 11 X Rp 450.000,00		Rp 4.950.000,00
PTKP sebenarnya 11 X (Rp 54.000.000,00 /360)		<u>Rp 1.650.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-11		Rp 3.300.000,00

PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 5% X Rp 3.300.000,00		Rp 165.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10		<u>Rp 0,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11		Rp 165.000,00

Sehingga pada hari ke-11, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar

Rp 450.000,00 - Rp 165.000,00

Rp 285.000,00

Misalkan Nurcahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke- 12 adalah sebagai berikut:

Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari	Rp 450.000,00
PTKP sehari	
(Rp54.000.000,00/360)	<u>Rp 150.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 300.000,00

PPh Pasal 21 Terutang	
5% X Rp 300.000,00	Rp 15.000,00

Sehingga pada hari ke-12, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar:	
Rp 450.000,00 - Rp 15.000,00	Rp 435.000,00

III.1.2 Nanang Hermawan (belum menikah) pada bulan Maret 2016 bekerja pada perusahaan PT Tani Jaya, menerima upah sebesar Rp650.000,00 per hari.

Upah sehari di atas Rp450.000,00 adalah (Rp650.000,00 - Rp450.000,00)	Rp 200.000,00
--	---------------

PPh Pasal 21 harian	
5% X Rp 200.000,00	Rp 10.000,00

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Nanang Hermawan telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000,00, sehingga telah melebihi Rp4.500.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Nanang Hermawan pada bulan Maret 2016 dihitung sebagai berikut:

Upah 7 hari kerja	Rp 4.550.000,00
PTKP	
7 X (Rp54.000.000,00/360)	<u>Rp 1.050.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.500.000,00

PPh Pasal 21	
5% X Rp 3.500.000,00	Rp 175.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-6	
6 X Rp 10.000,00	<u>Rp 60.000,00</u>

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7	Rp 115.000,00
---	---------------

Jumlah sebesar Rp115.000,00 ini dipotong dari upah harian sebesar Rp650.000,00 sehingga upah yang diterima Nanang Hermawan pada hari kerja ke-7 adalah:

Rp650.000,00 - Rp115.000,00	Rp 535.000,00
-----------------------------	---------------

Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah:

Upah sehari	Rp 650.000,00
PTKP	
(Rp54.000.000,00/360)	<u>Rp 150.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 500.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang	
5% X Rp 500.000,00	Rp 25.000,00

III.2 Dengan Upah Satuan

Rizal Fahmi (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakitan TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 125.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp3.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :
Upah sehari adalah
Rp3.000.000,00 : 6 = Rp 500.000,00

Upah diatas Rp450.000,00 sehari
Rp500.000,00- Rp450.000,00 =Rp 50.000,00

Upah seminggu terutang pajak
6 x Rp50.000,00 = Rp 300.000,00

PPh Pasal 21
5% x Rp300.000,00= Rp15.000,00 (Mingguan)

III.3 Dengan Upah Borongan

Contoh Penghitungan :

Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp950.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari: Rp950.000,00 : 2 =	Rp	475.000,00
Upah sehari diatas Rp450.000,00 Rp475.000,00 — Rp450.000,00	Rp	25.000,00
Upah borongan terutang pajak: 2 x Rp25.000,00	Rp	50.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp50.000,00 = Rp 2.500,00

III.4 Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tetapi Dibayarkan Secara Bulanan

Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp250.000,00. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak.

PPh Pasal 21 atas Gaji

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2016 = 20 x Rp250.000,00 = Rp 5.000.000,00

Penghasilan netto setahun = 12 x Rp5.000.000,00 = Rp60.000.000,00

Penghasilan netto setahun	Rp	60.000.000,00	
PTKP setahun			
- Untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	<u>4.500.000,00</u>	
			Rp 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak			Rp 1.500.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:

5% x Rp1.500.000,00 = Rp75.000,00

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:

Rp75.000,00 : 12 = Rp6.250,00

III.5 Pada bulan yang sama, Bagus Hermanto mendapatkan bonus sebesar Rp6.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Upah Januari 2016

20 X Rp 250.000,00 Rp 5.000.000,00

Penghasilan setahun

12 X Rp 5,000.000,00 Rp 60.000.000,00

Bonus

Rp 6.000.000,00

Penghasilan netto setahun

Rp 66.000.000,00

PTKP setahun

- untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00

- tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00

Rp 58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 7.500.000,00

PPh Pasal 21 setahun

5% X Rp 7.500.000,00 Rp 375.000,00

PPh Pasal 21 atas Bonus

Rp375.000,00 - Rp75.000,00 = Rp300.000,00

PPh Pasal 21 bulan Januari

Rp300.000,00 + Rp6.250,00 = Rp306.250,00

IV. PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PENSIUN OLEH PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI

IV.1. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai

Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2016 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2016 Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2014 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% X Rp 5.000.000,00 Rp 750.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong

Rp 3.250.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.2. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2016, yaitu bulan Desember 2016 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% X Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% X Rp 10.000.000,00	Rp 1.500.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	Rp 4.000.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.3. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai

Nicholas Sinulingga adalah pegawai PT Abadi Sejahtera menerima gaji Rp2.000.000,00 sebulan. PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Nicholas Sinulingga sebesar Rp 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Abadi Sejahtera, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Abadi Sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nicholas Sinulingga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000,00 sebulan. Pada bulan April 2016 Nicholas Sinulingga memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya, maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Pada bulan Juni 2016 ia menarik lagi dana sebesar Rp 15.000.000,00. Kemudian pada bulan Oktober 2016 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

- atas penarikan dana sebesar Rp20.000.000,00 pada bulan April 2016 terutang PPh Pasal 21 sebesar $5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp} 1.000.000,00$.
- atas penarikan dana sebesar Rp15.000.000,00 pada bulan Juni 2016 terutang PPh Pasal 21 sebesar $5\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$
- atas penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 pada bulan Oktober 2016 terutang PPh Pasal 21 sebesar:

5% X Rp 15.000.000,00	Rp 750.000,00
15% X Rp 10.000.000,00	Rp 1.500.000,00
	Rp 2.250.000,00

V. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI

V.1. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Yang Bersifat Berkesinambungan

V.1.a. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik

dr. Samudera Putra, Sp.OG merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Samudera Putra, Sp.OG pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, dr. Samudera Putra, Sp.OG juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya, dr. Samudera Putra, Sp.OG telah memiliki NPWP dan pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Samudera Putra, Sp.OG di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00

Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)=(3) x (5)
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	3.000.000 ----- 20.500.000	50.000.000 ----- 70.500.000	5% ----- 15%	150.000 ----- 3.075.000
April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	3.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	112.500.000	15%	3.300.000
Juni	52.000.000	26.000.000	138.500.000	15%	3.900.000
Juli	40.000.000	20.000.000	158.500.000	15%	3.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	176.000.000	15%	2.625.000
September	45.000.000	22.500.000	198.500.000	15%	3.375.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	220.500.000	15%	3.300.000
November	43.000.000	21.500.000	242.000.000	15%	3.225.000
Desember	40.000.000	8.000.000 ----- 12.000.000	250.000.000 ----- 262.000.000	15% ----- 25%	1.200.000 ----- 3.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000			35.500.000

Apabila dr. Samudera Putra, Sp. OG tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh tersebut.

V.1.b. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi (bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi)

Ety Rahmawati adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life. Suami Ety Rahmawati telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT Kersamanah. Ety Rahmawati telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Ety Rahmawati hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabaru Life. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Ety Rahmawati sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life adalah sebagai berikut:

Bulan	Bulan Komisi Agen (Rupiah)
Januari	45.000.000,00
Februari	45.000.000,00
Maret	48.000.000,00
April	52.000.000,00
Mei	55.000.000,00
Juni	58.000.000,00
Juli	58.000.000,00
Agustus	62.000.000,00
September	65.000.000,00
Oktober	66.000.000,00
November	68.000.000,00
Desember	70.000.000,00
Jumlah	692.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 adalah:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	50% dari Penghasilan Bruto	PTKP (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)= 50% \times (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) \times (7)
Januari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	18.000.000	5%	900.000
Februari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	36.000.000	5%	900.000
Maret	48.000.000	24.000.000	4.500.000	14.000.000 5.500.000	50.000.000 55.500.000	5% 15%	700.000 825.000
April	52.000.000	26.000.000	4.500.000	21.500.000	77.000.000	15%	3.225.000
Mei	55.000.000	27.500.000	4.500.000	23.000.000	100.000.000	15%	3.450.000
Juni	58.000.000	29.000.000	4.500.000	24.500.000	124.500.000	15%	3.675.000
Juli	58.000.000	29.000.000	4.500.000	24.500.000	149.000.000	15%	3.675.000
Agustus	62.000.000	31.000.000	4.500.000	26.500.000	175.500.000	15%	3.975.000
September	65.000.000	32.500.000	4.500.000	28.000.000	203.500.000	15%	4.200.000
Oktober	66.000.000	33.000.000	4.500.000	28.500.000	232.000.000	15%	4.275.000
November	68.000.000	34.000.000	4.500.000	18.000.000 11.500.000	250.000.000 261.500.000	15% 25%	2.700.000 2.875.000
Desember	70.000.000	35.000.000	4.500.000	30.500.000	292.000.000	25%	7.625.000
Jumlah	692.000.000	346.000.000					43.000.000

Dalam hal Ety Rahmawati tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Ety Rahmawati sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh tersebut namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh	Tarif tidak memiliki NPWP	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)= 50% \times (2)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) \times (5) \times (6)
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	1.350.000
Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	1.350.000
Maret	48.000.000	5.000.000 ----- 19.000.000	50.000.000 ----- 69.000.000	5% ----- 15%	120% ----- 120%	300.000 ----- 3.420.000
April	52.000.000	26.000.000	95.000.000	15%	120%	4.680.000
Mei	55.000.000	27.500.000	122.500.000	15%	120%	4.950.000
Juni	58.000.000	29.000.000	151.500.000	15%	120%	5.220.000
Juli	58.000.000	29.000.000	180.500.000	15%	120%	5.220.000
Agustus	62.000.000	32.000.000	212.500.000	15%	120%	5.760.000
September	65.000.000	32.500.000	245.000.000	15%	120%	5.850.000
Oktober	66.000.000	5.000.000 ----- 28.000.000	250.000.000 ----- 278.000.000	15% ----- 25%	120% ----- 120%	900.000 ----- 8.400.000
November	68.000.000	34.000.000	312.000.000	25%	120%	8.500.000
Desember	70.000.000	35.000.000	347.000.000	25%	120%	8.750.000
Jumlah	692.000.000	347.000.000				59.430.000

Dalam hal suami Ety Rahmawati atau Ety Rahmawati sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Ety Rahmawati mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh tersebut, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.

V.2. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN

V.2.a. Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000.000,00.
Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:
5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi

sebesar:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \text{ Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$$

- V.2.b.** Toga Marolop Simanjuntak adalah seorang pengacara. Dalam menangani sebuah kasus, Toga Marolop Simanjuntak mendapatkan fee sebesar Rp450.000.000,00 dari PT Manis Manja.

Perhitungan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21:

$$50\% \times \text{Rp}450.000.000,00 = \text{Rp} 225.000.000,00$$

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

$$5\% \times \text{Rp} 50.000.000,00 = \text{Rp} 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp}175.000.000,00 = \underline{\text{Rp} 26.250.000,00}$$

$$\text{Rp} 28.750.000,00$$

Dalam hal Toga Marolop Simanjuntak tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp} 50.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00$$

$$120\% \times 15\% \times \text{Rp} 175.000.000,00 = \underline{\text{Rp} 31.500.000,00}$$

$$\text{Rp} 34.500.000,00$$

V.3. CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN

Dedy Efriliansyah melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp 10.000.000,00. Dedy Efriliansyah mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. Selain itu, Dedy Efriliansyah membeli *spare part* AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp 1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Dedy Efriliansyah, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Dedy

Efriliansyah dan biaya untuk membeli *spare part* AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Dedy Efriliansyah adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Dedy Efriliansyah dan biaya *spare part* AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:

$$\text{Rp} 10.000.000,00 - \text{Rp}4.500.000,00 - \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$$

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Dedy Efriliansyah adalah sebesar:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}112.500,00$$

Dalam hal Dedy Efriliansyah tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}135.000,00$$

- b. Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Dedy Efriliansyah mengenai upah yang harus dikeluarkan Dedy Efriliansyah atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar :

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp} 10.000.000,00 = \text{Rp}250.000,00$$

Dalam hal Dedy Efriliansyah tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp} 10.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$$

Catatan:

Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Dedy Efriliansyah.

VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PESERTA KEGIATAN

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Sony Gemilang adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* tersebut adalah:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 \quad \text{Rp} 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp} 150.000.000,00 \quad \underline{\text{Rp} 22.500.000,00}$$

$$\text{Rp} 25.000.000,00$$

Catatan: Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi

VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING

Done Preksi adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar US\$2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp 13.394,00,00 untuk US\$ 1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah:

US\$2,500 xRp 13.394,00 = Rp33.485.000,00

PPh Pasal 26 terutang adalah:

20% X Rp33.485.000,00 = Rp6.697.000,00